

KONFLIK KEPENTINGAN – PENGELOLAAN

2026

PERBUPKAB BANGKA NO 20, BD 2026/ NO 20, 14 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

ABSTRAK : - bahwa konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat menguntungkan pejabat pemerintah tertentu / orang lain yang dapat merugikan masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintahan. Peraturan Bupati Bangka Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab Bangka No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Bangka No. 3 Tahun 2019; Permenpan RB No. 17 Tahun 2024.
- Peraturan Bupati ini mengatur pedoman pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai upaya mencegah dan menangani konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Pengaturan meliputi prinsip pengelolaan konflik kepentingan, kewajiban pelaporan, mekanisme penanganan, peran perangkat daerah, pembinaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, objektif, transparan dan akuntabel. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan kepentingan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2026.

- Lampiran : 19 hlm.